

Pokja Lingkungan Hidup



## Desa Wonoasri Jember Diresmikan sebagai Pusat Batik Warna Alam Taman Nasional Meru Betiri

JEMBER, 31 Juli 2019 - Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), bekerja sama dengan Universitas Jember turut memberdayakan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai Pusat Batik Warna Alam Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Dengan pendanaan dari USAID, sejak tahun 2017 hingga 2018, Indonesia Climate Change Trust Fund telah menyalurkan pendanaan untuk program “Pengelolaan Area Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Melalui Pembangunan Desain Plot Demonstrasi Menggunakan Penutupan Vegetasi Keberlanjutan”.

Tak hanya berhasil dalam melakukan rehabilitasi dan meningkatkan produktivitas kawasan Taman Nasional Meru Betiri, program ini juga berhasil memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis pengetahuan dan potensi alam. Salah satu hasil inovatif dari klaster ekonomi masyarakat tersebut adalah Batik Meru Betiri, yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Wonoasri, dengan mengkombinasikan corak batik khas Meru Betiri dengan

pewarna yang berasal dari alam misalnya daun jati, biji pohon joho lawe, daun tanaman putri malu, hingga kulit kayu pohon jambal.

Dengan pertimbangan tersebut, Desa Wonoasri diresmikan sebagai Pusat Batik Meru Betiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, pada hari Rabu (31/7) di Gedung Rektorat Universitas Jember didampingi oleh Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D.

Pemberdayaan masyarakat sekitar TNMB ini turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, manajemen, permodalan dan akses kepada pasar sekaligus memanfaatkan kekayaan alam TNMB. Penggunaan pewarna alam berasal dari akar dan batang tanaman mangrove, daun jati dan tumbuhan putri malu dan sebagainya. Terdapat 13 motif batik yang bersumber dari kekayaan hayati TNMB baik flora maupun flora misalnya motif sumber elang, lembah padmosari, jejak matul, siput meru, botol cabe, rekahan rafflesia, pucuk

cabe jawa, kuncup cabe, kepek elang, tapak asri, lebah meru, hingga alas meru. Sejak awal 2018 sudah terbentuk berbagai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memanfaatkan kekayaan alam TNMB mulai dari KUBE Batik Warna Alam, minuman herbal hingga camilan khas Desa Wonoasri.

Program rehabilitasi kawasan hutan lindung ini turut mendukung target penurunan emisi di Provinsi Jawa Timur bidang Kehutanan tahun 2013-2020 adalah sebesar 6.221.572 ton CO<sub>2</sub>eq (PERGUB Jawa Timur No 67 tahun 2012). Dengan diresmikannya Desa Wonoasri sebagai Pusat Batik Meru Betiri maka masyarakat terutama kelompok usaha dan kelompok perempuan dilibatkan dalam pelestarian alam sekaligus memberi akses pemberdayaan ekonomi.

Program rehabilitasi TNMB ini dilaksanakan dalam enam sub program di antaranya penanaman tanaman ekonomi non kayu, peningkatan kesuburan dan daya sangga tanah, penilaian ekologi kawasan

(bersambung halaman 2)

rehabilitasi, pembuatan hutan kolong dan pekarangan, perumusan kerjasama baru antara Tanam Nasional Meru Betiri dengan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai daerah penyangga TNMB. Fakta menunjukkan bahwa banyak warga Desa Wonoasri yang merantau dan menjadi buruh migran. Dengan mempertimbangkan aspek perkembangan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta memperhatikan lingkungan dalam perkembangannya para peneliti Universitas Jember memfasilitasi kelompok pembatik Kehati yang beranggotakan 46 orang untuk mendapatkan pelatihan membatik dengan pewarna alam yang berasal dari TNMB.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan harapan bahwa apa yang dilakukan Bappenas, ICCTF, USAID dan Universitas Jember dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang sekaligus meningkatkan



ekonomi masyarakat, dapat menjadi langkah awal dan contoh yang baik, yang dapat menginspirasi bagi pihak-pihak lain untuk melakukan replikasi. “Sebagai

penutup, pada kesempatan ini saya resmikan Desa Wonoasri, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebagai Desa Pusat Batik Meru Betiri” ujar Bambang.

## Perhitungan Dampak Luasan Area Restorasi dari Pembangunan Infrastruktur Pembasahan di Lahan Gambut

Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan *workshop* Perhitungan Dampak Luasan Area Restorasi dari Pembangunan Infrastruktur Pembasahan di Lahan Gambut pada 17-18 September 2019 di Bogor. *Workshop* ini diikuti oleh staf Indonesia Climate Change Trust Fund dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Muhammad Taufik (ahli hidrologi) dan Imam Basuki (ahli perhitungan karbon).



Kedua narasumber tersebut memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai lahan gambut dan secara khusus melakukan perhitungan luasan area terdampak dari pembangunan infrastruktur di lahan gambut, seperti sekat kanal, penanaman kembali (revegetasi), dan sumur bor.

Melalui program TEGAK yang dibiayai hibah UKCCU, ICCTF bekerjasama dengan mitra pelaksana telah membangun berbagai infrastruktur pembasahan kembali di sejumlah provinsi. Perhitungan karbon stok dan penurunan emisi dari program ICCTF telah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, luasan area restorasi

secara keseluruhan dari pembangunan infrastruktur pembasahan pada periode (2017-2019) belum dapat dihitung, karena keterbatasan informasi mengenai validitas metode yang digunakan dalam menghitung luasan area restorasi.

Dalam kerangka program TEGAK, UKCCU telah menetapkan luas restorasi gambut seluas 26.167 ha sebagai salah satu *Key Performance Indicator*. Oleh karena itu, kegiatan *workshop* ini dinilai penting untuk dilaksanakan, untuk mendapatkan hasil perhitungan luasan restorasi gambut yang *valid* dan *reliable* dari berbagai upaya dan pendekatan yang telah dilakukan.



## Manfaat *Smart Farming* di Lahan Gambut Riau

ICCTF terus mengembangkan inovasi untuk memberikan dampak untuk masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Keberhasilan sistem SRI (*System of Rice Intensification*) di Waingapu, Sumba Timur memacu ICCTF untuk melanjutkan pemanfaatan teknologi untuk pertanian atau dikenal dengan pertanian 4.0.

Pemanfaatan teknologi akan membantu dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, hal ini terbukti dari pemasangan alat telemetri sebagai bentuk inisiasi penerapan smart farming pada lahan gambut. Manfaatnya mulai dirasakan oleh para petani di desa intervensi proyek Indonesia Climate Change Trust Fund. Pada 28 Juli hingga 1 Agustus 2019 proses pemasangan alat telemetri telah dilakukan di dua desa program kerjasama ICCTF dengan dua mitra yaitu Riau Women Working Group (Desa Parit I /II) dan Yayasan Mitra Insani (Desa Lalang).

Demplot agroforestri di Desa Parit I /II seluas 0,5 ha telah dipasang alat telemetri untuk memantau kondisi tanah dan iklim, sehingga dari rekomendasi pengelolaan lahan pertanian diharapkan dapat memberikan hasil panen yang optimal. Penanaman bawang sudah memasuki penanaman kedua dengan 150 kg bibit yang ditanam. Pada periode tanam pertama, telah dihasilkan bawang merah 120 kg meskipun terkendala banjir di bulan September. Masa tanam bawang merah selama 65 hari, dan pada periode ini dapat dilihat efektivitas penggunaan alat telemetri terhadap hasil panen bawang merah.

Desa Lalang memiliki komoditas utama berupa jagung, setelah sebelumnya dilakukan penanaman terong. Berdasarkan keterangan masyarakat hasil penjualan terong mencapai 1,2 juta dengan harga terong Rp 8000/kg. proses penanaman dan perawatan juga melibatkan siswa pesantren.

## Pokja Energi



## Kunjungan Kerja ke Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah

Pada Agustus 2019, Pokja II ICCTF melakukan kunjungan kerja ke Luwuk, Sulawesi Tengah untuk melaksanakan bantuan *technical assistance* penguatan kualitas dokumen studi kelayakan PLT Sampah (PLTSa) Luwuk kerja sama dengan GGGI dan Kaltimex Energy. Kunjungan tersebut bertujuan untuk pengumpulan data dan informasi khususnya mengenai kondisi lokasi pembangunan PLT Sampah yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bungah. Dari kunjungan tersebut didapatkan informasi yaitu TPA Bungah dibangun pada 2016 dengan luas mencapai 3 ha dengan timbunan sampah mencapai 15 meter. Setiap harinya sampah yang masuk mencapai ±35 ton/hari, yang rata-rata terdiri dari 70% sampah organik dan 30% sampah anorganik.

Tantangan pembangunan PLT Sampah tersebut adalah pemilihan teknologi dan sistem pengelolaan air limbah. Hal ini dikarenakan ketika musim hujan, kolam terbuka penampungan air limbah akan penuh dan air limbah akan mengalir ke pesisir Pantai Luwuk. Kondisi ini berpotensi mencemari daerah sekitar pesisir pantai. Diharapkan pengelolaan air limbah harus terlebih dahulu ditangani oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Kaltimex Energy.

## Kunjungan Kerja ke Bappeda Provinsi Sumatera Utara & Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data awal untuk kegiatan penyusunan dokumen studi kelayakan (*Pre-Feasibility Study*) proyek energi terbarukan. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lokasi prioritas penyusunan dokumen studi kelayakan proyek energi terbarukan tahun anggaran 2019. Dalam kunjungan ini, Kepala Bappeda mengusulkan agar lokasi studi kelayakan proyek terlebih dahulu disampaikan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk melihat daerah yang



paling siap ketersediaan datanya, serta mempertimbangkan hasil analisis lokasi berdasarkan kriteria yang telah dibuat oleh tim konsultan. Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merekomendasikan agar penyusunan dokumen studi kelayakan dilakukan di Pulau Nias atau Pulau Berhala mengingat rasio elektrifikasi Pulau Nias masih kecil dengan potensi pariwisatanya cukup besar.

## Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 di UN Global Compact, New York, Amerika Serikat

Perwakilan Indonesia Climate Change Trust Fund ikut hadir dalam pertemuan P4G dalam UN Global Compact pada September 2019. Indonesia merupakan salah satu negara yang baru bergabung pada *Partnering for Green Growth and the Global Goals* (P4G). P4G bertujuan untuk mempercepat implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menyatukan sektor swasta, masyarakat sipil, otoritas publik dalam kerjasama terkait pertumbuhan hijau dan inklusif.

Indonesia mendukung sepenuhnya agenda kerja P4G, dengan Kementerian PPN/ Bappenas sebagai *focalpoint* P4G di Indonesia sehingga perlu menentukan tema prioritas yang akan dimasukkan dalam agenda kerja P4G sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Selain itu masih ada pekerjaan rumah diantaranya perlunya terobosan untuk mempercepat kerjasama sektor publik dan swasta dalam pencapaian prioritas



nasional, serta perlu mendorong dukungan dari instansi pemerintah dalam mendukung & mengimplementasikan P4G *Partnership* di Indonesia.

P4G menyediakan bantuan pendanaan untuk kerja sama pada proyek dalam fase *start-up* dan *scale-up*. Pada tahun 2020, agenda kerja P4G akan berfokus pada pembentukan *co-create partnership*. *Co-create partnership* tersebut dilaksanakan melalui tiga prioritas P4G tahun 2020, yaitu: (a) perumusan solusi; (b) mobilisasi aktor kunci; (c) pertukaran pengetahuan dan pembelajaran. Prioritas kegiatan P4G tahun 2020 yang meliputi *Renewable Energy Finance*, *Zero Emission Transport*, *Food Loss and Market*, *New Plastics Market*, *Sustainable Infrastructure*, serta *Innovative Financing and Business Models*.

## Pemilihan Lokasi Prioritas Kajian Pemetaan Potensi Hutan Energi untuk Biomassa



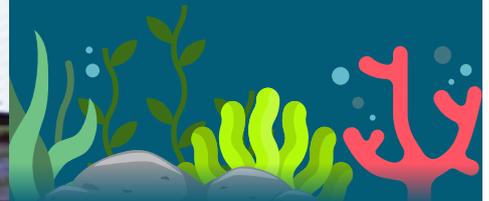
*Focus Group Discussion* (FGD) Pemilihan Lokasi Prioritas Kajian Pemetaan Potensi Hutan Energi untuk Biomassa dilaksanakan pada Oktober 2019 di Bogor. Narasumber yang hadir diantaranya dari perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian LHK, serta Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).

Berdasarkan hasil analisis dan *scoring* yang dilakukan oleh tim konsultan serta pembahasan hasil rapat maka diputuskan bahwa lokasi prioritas untuk pemetaan kajian akan dilakukan di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam diskusi ini juga diperoleh data sekunder mengenai jenis tanaman hutan energi, serta mekanisme budidaya tanaman hutan energi yang cocok di Indonesia.

Pokja Kelautan dan Perikanan



## Our Action for Healthy Coral and Better Ocean



Ekspose *Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP CTI)* dan Konsorsium Riset Samudera (KRS) telah diselenggarakan pada 15 Agustus 2019 di Jakarta. Mengusung tema “*Our Action for Healthy Coral and Better Ocean*”, Ekspose COREMAP–CTI dan KRS bertujuan untuk menjadi wadah memperkenalkan COREMAP–CTI dan KRS kepada pemangku kepentingan terkait, masyarakat luas, serta menjaring masukan substansial terkait pengelolaan kawasan pesisir dan samudera. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan kelautan yang kuat, terstruktur, dan komprehensif. Kegiatan Ekspose COREMAP–CTI dan KRS dibuka dengan sambutan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Bappenas selaku Ketua *Steering Committee* COREMAP–CTI, Gellwyn Jusuf. “Pembentukan KRS senada dengan visi Presiden Joko Widodo dan tercantum pada target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 14 tentang Ekosistem Laut, yakni pengelolaan sektor kelautan dengan perencanaan berbasis IPTEK disertai ketersediaan informasi pengetahuan yang memadai. Sementara COREMAP–CTI merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kawasan pesisir, secara khusus pada ekosistem terumbu karang agar tetap dikelola secara optimal dan lestari,” ujarnya.

Gellwyn menjelaskan, program ini akan menjadi stimulus bagi peningkatan

nilai aset terumbu karang dan sumber daya terkait guna memperkuat pilar kemakmuran masyarakat pesisir dan kemajuan bangsa Indonesia. Komitmen COREMAP–CTI dan KRS merupakan kunci dalam menghasilkan peningkatan kualitas riset yang menjadi landasan rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan sektor kelautan.

Berbicara mengenai perubahan iklim, tentunya ekosistem pesisir tak lepas dari kemampuan menyerap emisi karbon, hasil kajian terakhir menunjukkan bahwa ekosistem pesisir seperti bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*), *seagrass* (padang lamun) punya kemampuan tiga kali lipat untuk menyerap emisi dibanding ekosistem terestrial. Di masa depan kemampuan menyerap emisi karbon ini mempunyai nilai secara global dengan konsep *carbon trade*, penting bagi Indonesia untuk menjaga ekosistem tersebut. COREMAP–CTI hadir untuk menjaga ekosistem laut berbasis ilmu pengetahuan, berbasis masyarakat, dan memadukan semua sumber pendanaan (*blended finance*). COREMAP–CTI akan melaksanakan proyek percontohan yang dapat direplikasi di wilayah-wilayah Indonesia lainnya.

Bappenas melalui satuan kerja (satker) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) berfokus terhadap peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir yang prioritas. Lokasi pelaksanaan proyek COREMAP – CTI meliputi 39 situs, yang berlokasi di 7 kota dan 38 kabupaten di 16

provinsi. Enam belas dari 39 situs tersebut adalah Kawasan Konservasi Perairan baik di level nasional maupun daerah, yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang, Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Tenggara, TWP Laut Banda, TWP Padaido, TWP Gili Matra, TWP Kepulauan Anambas, and TWP Kepulauan Pieh, TNP Kepulauan Seribu, Taman Pesisir Derawan, Taman Nasional Pulau Komodo, TWP Pulau Moyo, dan Taman Nasional Taka Bonerate, SAP Waigeo Sebelah Barat, SAP Raja Ampat, TNP Laut Sawu, dan KKPD Kep. Raja Ampat.



# Persiapan Pelaksanaan Proyek COREMAP – CTI

Dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek, Tim Pokja III ICCTF melakukan penyempurnaan terhadap konsep Pedoman Tata Kelola Hibah. Dengan asistensi dari Tenaga Ahli dari pihak donor World Bank, telah dilaksanakan beberapa pertemuan guna menjangkau masukan dan mengidentifikasi gap pada konsep pedoman yang saat ini dimiliki. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pelaksana proyek dan calon mitra pelaksana sebagai sumber informasi meliputi segala aspek proyek, yaitu Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Penyelesaian serta tata laksana administrasi proyek.

Pelaksanaan Proyek COREMAP – CTI sangat memerlukan persiapan yang matang. Dalam konteks sosialisasi serta menghimpun masukan – masukan substansial untuk menjawab tujuan daripada proyek COREMAP – CTI baik World Bank (WB) maupun Asian Development Bank (ADB), maka pertemuan/kunjungan ini diselenggarakan. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2019 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini terdiri dari pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Kantor BKKPN Kupang dan Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Kupang.



Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi gambaran umum proyek COREMAP – CTI WB dan ADB, membahas secara detail kegiatan COREMAP – CTI WB dan ADB, serta membahas hal-hal berkembang lainnya. Pertemuan yang dilakukan di Kantor BKKPN Kupang, dihadiri oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir Bappenas, Kasubdit KKKHL KKP, Kabag Program Setditjen PRL KKP, Kepala BKKPN Kupang, SKIPM Kupang, PSDKP Kupang, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT, *Team Leader* Pokja III ICCTF, Staf Pokja III – ICCTF, Staf Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, Staf BKKPN Kupang, Politeknik KP Kupang, Perwakilan Universitas Cendana Kupang dan NGO.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini didapatkan beberapa masukan yang diperoleh khususnya terkait dengan detail kegiatan yang sudah dimasukkan ke dalam *log frame*, kesesuaian lokasi calon penerima manfaat proyek, HPS, dan *breakdown* beberapa kegiatan yang dinilai masih relevan. Informasi detail yang didapatkan

dari hasil konsultasi dan kordinasi ini, selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan TOR untuk setiap paket kegiatan. Disamping itu juga beberapa masukan yang diperoleh akan diadopsi sebagai referensi dalam mekanisme pelaksanaan *call for proposal*.

Keberadaan COREMAP – CTI dalam membangun atau bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang sangat penting untuk adopsi ke tingkat pendidikan formal. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memasukan materi penyadartahuan akan pentingnya menjaga pesisir dan ekosistem terumbu karang ke dalam mata pelajaran muatan lokal di tingkatan SD, SMP atau bahkan SMA. Teknisnya, kegiatan ini bisa dijalankan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa sekolah di sekitar lokasi pelaksanaan proyek. Sebagai langkah tindak lanjut ke depan, perlu dipersiapkan waktu agar dapat melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi NTB dan Bali, khususnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan COREMAP – CTI ADB.





# Round Table FGD Meeting Blended Finance, Jakarta

Kegiatan *Round Table FGD Meeting Blended Finance* Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 di Hotel Morissey Jakarta dan dihadiri oleh Gellwyn Jusuf selaku Staf Khusus Menteri Bappenas, Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir PPN/Bappenas, *Team Leader* Pokja III ICCTF, Deputi ADB, *Project Director* PT SMI, OJK, *Vice President* RARE Arlington, *Vice President* RARE Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Staf Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, Staf Pokja III ICCTF, dan Staf RARE Indonesia.

Tujuan dari FGD ini adalah memberikan gambaran mengenai mekanisme pendanaan *Blended Finance* bidang Kelautan dan Perikanan sekaligus melakukan identifikasi awal terkait infrastruktur yang perlu dibangun atau ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Pada kegiatan ini juga dijelaskan peran dari Bappenas, PT. SMI, ADB dan RARE.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Syaid Sadiansyah selaku Deputi ADB, Darwin selaku *Project Director* PT SMI, dan Gellwyn Jusuf selaku Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas. Selanjutnya dilakukan paparan oleh Taufik Alimi dan Valeria selaku *Vice President* RARE serta paparan oleh Tonny Wagey selaku *Team Leader* Pokja III ICCTF dan Isti selaku Perwakilan OJK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara juga ikut serta dalam memberikan paparan serta diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 09.00 s/d 17.00.



